



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## URGENSI MITIGASI BENCANA DI JAWA BARAT

**Rohani Budi Prihatin**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rohani.prihatin@dpr.go.id](mailto:rohani.prihatin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Gempa bumi tektonik yang melanda Kabupaten Cianjur sekitarnya menimbulkan daya rusak luar biasa. Gempa tektonik bermagnitudo 5,6 yang terjadi pada tangga 21 November 2022, pukul 13.21 WIB, menyadarkan kembali warga Jawa Barat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau pencegahan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan hingga Rabu 30 November 2022 korban meninggal akibat gempa Cianjur mencapai 327 jiwa, hilang 13 orang dan kerusakan infrastruktur seperti rumah total berjumlah 22.198 unit. Sementara itu, jumlah pengungsi sampai hari ini mencapai 73.874 orang. Rinciannya, pengungsi laki-laki 33.713 orang, perempuan 40.161 orang, penyandang disabilitas 92 orang, ibu hamil 1.207 orang, dan lansia 4.240 orang. Besarnya korban jiwa, baik meninggal maupun luka, serta kerusakan rumah dan infrastruktur tersebut menunjukkan belum maksimalnya upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut. Banyaknya rumah warga yang rusak menunjukkan bahwa hunian warga Cianjur dibangun dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah ketahanan gempa seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur harus memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa daerah yang mereka huni memiliki potensi gempa sewaktu-waktu. Selain itu, masyarakat juga harus melek literasi dan pengetahuan bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan gempa sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan. Masyarakat Cianjur tentu belum lupa pada tahun 2009 lalu, Kabupaten Cianjur juga dilanda gempa bumi yang menyebabkan 28 orang meninggal, 42 orang hilang dan 21 orang luka-luka, serta 10.047 penduduk mengungsi. Seringnya kejadian gempa ini sejalan dengan temuan para peneliti yang menunjukkan banyaknya sesar aktif yang melintasi kawasan berpenduduk padat di Pulau Jawa.

Berdasarkan pengamatan, rata-rata korban yang meninggal dalam gempa di Cianjur akibat tertimpa bangunan yang rusak akibat gempa. Dengan memperhatikan banyaknya rumah tinggal yang rusak dan banyaknya korban yang tertimpa bangunan maka perlu sejumlah tindakan mitigasi bencana sebelum gempa bumi terjadi, yakni mendirikan bangunan sesuai aturan baku (tahan gempa) dan mengenali lokasi bangunan tempat tinggal penduduk. Selama ini masyarakat kurang sadar akan pentingnya mitigasi bencana, padahal Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Anak-anak sekolah dididik untuk melek bencana dengan tujuan untuk membentuk sikap mental sadar bencana sejak dini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun lalu sebenarnya sudah menyiapkan cetak biru Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana (*resilience culture province*). Program ini harus ditanamkan ke benak kepada seluruh warga melalui pendidikan sekolah sejak dini maupun melalui pelatihan rutin sehingga tercipta budaya sadar bencana seperti layaknya masyarakat Jepang. Semua pihak harus siap menghadapi kebencanaan lingkungan melalui pendekatan multidimensi, termasuk pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah. Cetak biru kebencanaan mendesak untuk direalisasikan agar bisa meminimalisasi dampak dari bencana alam, seperti gempa yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi.

## Atensi DPR

Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Bencana bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja, dan sulit diprediksi kapan terjadinya. Oleh karena susah untuk diprediksi maka langkah yang tepat untukantisipasi adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah dan meminimalisasi korban bencana alam di masa kini dan masa yang akan datang. Ke depan, Komisi VIII perlu mendorong agar masyarakat di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya diwajibkan untuk membangun rumah tinggal mereka dengan menggunakan skema standar rumah antigempa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar jika dikemudian hari terjadi gempa susulan tidak menelan korban meninggal yang tinggi.

## Sumber

antaranews.com, 24 November 2022;  
cnnindonesia.com, 23 November 2022;  
kompas.com, 27 dan 30 November 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Rasbin  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022